



PROFIL PNS KABUPATEN BATANG

PERIODE AGUSTUS 2023

REGISTER BPS : K-22.3325.001

Jumlah PNS Kabupaten Batang Berdasarkan

1. PANGKAT DAN GOLONGAN
2. ESELON JABATAN
3. TINGKAT PENDIDIKAN
4. JENIS KELAMIN
5. AGAMA
6. USIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk menyusun PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE AGUSTUS 2023 ini. Profil ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu **Tujuan ke-2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel**, dengan **Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)”**.

PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE AGUSTUS 2023 ini disusun sebagai salah satu penyedia informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Semoga PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE AGUSTUS 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Batang, 15 Agustus 2023
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
KABUPATEN BATANG

DWI RIYANTO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197607101996021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 METODE PENYUSUNAN DATA.....	4
1. PENGUMPULAN DATA.....	4
2. PENYAJIAN DATA.....	4
BAB II HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI.....	1
TABEL 2.1 PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN.....	2
TABEL 2.2 PNS BERDASARKAN ESELON JABATAN.....	2
TABEL 2.3 PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	3
TABEL 2.4 PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	3
TABEL 2.5 PNS MENURUT AGAMA.....	6
TABEL 2.6 PNS BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI.....	8
TABEL 2.7 PNS FUNGSIONAL PENDIDIKAN.....	8
TABEL 2.8 PNS MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN.....	9
TABEL 2.9 PNS FUNGSIONAL LAINNYA.....	12
TABEL 2.10 PNS FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA).....	20
TABEL 2.11 PNS BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD.....	25
TABEL 2.12 JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA PER-OPD.....	27
TABEL 2.13 JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-OPD.....	29
TABEL 2.14 JUMLAH PNS BERDASARKAN AGAMA PER-OPD.....	31
TABEL 2.15 JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER-OPD.....	33
GAMBAR 2.1. JUMLAH PNS DALAM GRAFIK.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, sehingga pengaruhnya pada kinerja dan tingkat kehidupan manusia seiring dengan perkembangan global. Era Teknologi Informasi (TI) dimana semua hal ikhwal dapat dijelajahi, ditelusuri bahkan tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Penggunaan Teknologi Informasi dapat menunjang kegiatan kerja atau mempermudah penyelesaian tugas- tugas di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan tugas kedinasan juga akan meningkat. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif.

Setiap pengelola manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerja keras meningkatkan mutu dan keakuratan dalam menyajikan data kepegawaian di era yang semakin kompetitif ini. Database yang semakin variatif diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang luas bagi pimpinan, sehingga data yang disajikan sangatlah penting untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang strategis secara cepat dan tepat.

Badan Kepegawaian Daerah Batang sebagai perangkat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dimana diantaranya mencakup pengelolaan data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk

aneka informasi Statistik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi data kepegawaian yang telah disusun sering dimanfaatkan oleh unit kerja, lembaga-lembaga di luar kepegawaian. Kenyataan ini melahirkan pemikiran perlunya data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dibuat dalam bentuk Profil Laporan, sehingga keperluan informasi data kepegawaian dapat ditangani dengan lebih tepat, cepat dan akurat dalam kualitas sajian yang menarik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Profil PNS Kabupaten Batang Bulan Agustus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

- Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 - f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 13);
 - g. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);

1.3. Maksud dan Tujuan

Profil PNS Pemerintah Kabupaten Batang Bulan Agustus 2023 mengandung maksud dan tujuan:

1. Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 44 (empat puluh empat) perangkat daerah sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang.
3. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
4. Secara bertahap dan berjangka panjang menyiapkan data

dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Batang

1.4 Metode Penyusunan Data

Penyusunan PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE AGUSTUS 2023 disusun dengan langkah-langkah dan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian dilakukan dengan melakukan peremajaan secara rutin data Sistem Informasi Kepegawaian yang dilakukan oleh Admin OPD dan diolah oleh tim pengelola database kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dan proses sinkronisasi data / verifikasi dan validasi data kepegawaian. Data kepegawaian yang terkumpul merupakan data akhir dan terbaru, dengan maksud guna memperoleh data yang sesuai dengan peraturan perundangan, tepat, akurat dan akuntabel.

2. Penyajian Data

Data kepegawaian hasil update dari masing-masing instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Batang merupakan data kuantitatif, selanjutnya dihimpun dan dikelompokkan dalam bentuk tabel, untuk selanjutnya dianalisa lalu diambil konklusi sesuai kebutuhan.

BAB II

HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI

Berdasarkan hasil pengolahan data kepegawaian sampai dengan 30 Agustus 2023 diperoleh data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan
2. Jumlah PNS berdasarkan Eselon Jabatan
3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin
5. Jumlah PNS berdasarkan Agama
6. Jumlah Jabatan Yang Tersedia dan Terisi
7. Jumlah PNS berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional
8. Jumlah PNS berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah PNS Kabupaten Batang keadaan Bulan **Agustus 2023 adalah 5.415** PNS terinci sebagai berikut :

Jumlah PNS Kabupaten Batang keadaan Bulan **Agustus 2023**
5.415 PNS

TABEL 2.1 PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Golongan	Pangkat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/c	Juru	5	1	6
I/d	Juru Tingkat I	63	5	68
II/a	Pengatur Muda	34	2	36
II/b	Pengatur Muda Tingkat I	83	6	89
II/c	Pengatur	203	118	321
II/d	Pengatur Tingkat I	202	131	333
III/a	Penata Muda	351	517	868
III/b	Penata Muda Tingkat I	343	517	860
III/c	Penata	282	553	835
III/d	Penata Tingkat I	289	492	781
IV/a	Pembina	389	472	861
IV/b	Pembina Tingkat I	139	155	294
IV/c	Pembina Utama Muda	47	15	62
IV/d	Pembina Utama Madya	-	1	1
	Jumlah	2.430	2.985	5.415

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS terbanyak adalah PNS Golongan III (3344 PNS) , diikuti PNS Golongan IV (1218 PNS), PNS Golongan II (779 PNS) dan jumlah PNS terendah adalah PNS Golongan I (74 PNS).

TABEL 2.2 PNS BERDASARKAN ESELON JABATAN

Jenis Jabatan	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Total
Jabatan Fungsional Tertentu	NON	1.322	2.444	3.766
Jabatan Fungsional Umum	NON	865	413	1.278
Jabatan Struktural	II.a	-	1	1
Jabatan Struktural	II.b	25	1	26
Jabatan Struktural	III.a	40	5	45
Jabatan Struktural	III.b	55	31	86
Jabatan Struktural	IV.a	85	67	152
Jabatan Struktural	IV.b	38	23	61
		2.430	2.985	5.415

Dari Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa jumlah Eselon PNS terbanyak adalah Eselon IV (213 PNS), diikuti PNS Eselon III (131 PNS), PNS Eselon II (27 PNS) .

TABEL 2.3 PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S-3/Doktor	3	1	4
S-2	180	140	320
S-1/Sarjana	1.344	1.879	3.223
Diploma IV	24	60	84
Diploma III/Sarjana Muda	179	714	893
Diploma II	47	26	73
Diploma I	1	4	5
SLTA Kejuruan	44	11	55
SLTA	454	133	587
SLTP Kejuruan	1	-	1
SLTP	107	9	116
Sekolah Dasar	46	8	54
Jumlah	2.430	2.985	5.415

Dari Tabel 2.3 jumlah PNS didominasi oleh tingkat pendidikan S1 (3.223 PNS), diikuti oleh tingkat pendidikan D.III (893 PNS) dan paling sedikit adalah tingkat pendidikan D.I (5 PNS) .

TABEL 2.4 PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	UNOR	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	17	14	31
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	11	19
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	32	37	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12	15	27
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	15	38	53
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	15	24	39
7	DINAS KESEHATAN	631	161	792

8	DINAS KETENAGA KERJAAN	11	8	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	17	27
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12	38	50
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	34	39	73
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12	18	30
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15	112	127
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	11	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12	13	25
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	11	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.639	1.212	2.851
18	DINAS PERHUBUNGAN	4	41	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	13	64	77
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	19	14	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13	25	38
22	DINAS SOSIAL	6	13	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	25	21	46
24	KECAMATAN BANDAR	5	13	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	4	8	12
26	KECAMATAN BATANG	21	48	69
27	KECAMATAN BAWANG	4	9	13
28	KECAMATAN BLADO	5	7	12
29	KECAMATAN GRINGSING	4	8	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	1	10	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	4	7	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	-	9	9
33	KECAMATAN REBAN	1	15	16
34	KECAMATAN SUBAH	1	10	11
35	KECAMATAN TERSONO	3	10	13
36	KECAMATAN TULIS	3	12	15
37	KECAMATAN WARUNGASEM	4	8	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	5	8	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	13	22

40	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG	1	-	1
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	223	113	336
42	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	67	29	96
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5	41	46
44	SEKRETARIAT DAERAH	37	71	108
45	SEKRETARIAT DPRD	5	24	29
	Jumlah	2.985	2.430	5.415

Dari Tabel 2.4 jumlah PNS dengan jenis kelamin perempuan menjadi yang terbanyak (2.985 PNS) sedangkan PNS dengan jenis kelamin laki-laki 2.430 PNS, selisih 555 PNS .

TABEL 2.5 PNS MENURUT AGAMA

No	UNOR	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	30	-	1	-	-	-	31
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19	-	-	-	-	-	19
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	67	1	1	-	-	-	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	27	-	-	-	-	-	27
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	53	-	-	-	-	-	53
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38	-	1	-	-	-	39
7	DINAS KESEHATAN	782	2	7	-	1	-	792
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	19	-	-	-	-	-	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27	-	-	-	-	-	27
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	49	-	1	-	-	-	50
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	73	-	-	-	-	-	73
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30	-	-	-	-	-	30
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	127	-	-	-	-	-	127
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	-	-	-	-	-	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25	-	-	-	-	-	25
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	2	-	-	-	-	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.815	13	23	-	-	-	2.851
18	DINAS PERHUBUNGAN	43	1	1	-	-	-	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	77	-	-	-	-	-	77
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	33	-	-	-	-	-	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	37	-	1	-	-	-	38
22	DINAS SOSIAL	19	-	-	-	-	-	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	45	1	-	-	-	-	46
24	KECAMATAN BANDAR	18	-	-	-	-	-	18

25	KECAMATAN BANYUPUTIH	12	-	-	-	-	-	12
26	KECAMATAN BATANG	69	-	-	-	-	-	69
27	KECAMATAN BAWANG	13	-	-	-	-	-	13
28	KECAMATAN BLADO	12	-	-	-	-	-	12
29	KECAMATAN GRINGSING	12	-	-	-	-	-	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	11	-	-	-	-	-	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	11	-	-	-	-	-	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	8	-	1	-	-	-	9
33	KECAMATAN REBAN	16	-	-	-	-	-	16
34	KECAMATAN SUBAH	11	-	-	-	-	-	11
35	KECAMATAN TERSONO	13	-	-	-	-	-	13
36	KECAMATAN TULIS	15	-	-	-	-	-	15
37	KECAMATAN WARUNGASEM	12	-	-	-	-	-	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	13	-	-	-	-	-	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21	-	1	-	-	-	22
40	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG	1	-	-	-	-	-	1
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	331	2	2	-	1	-	336
42	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	95	-	1	-	-	-	96
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45	1	-	-	-	-	46
44	SEKRETARIAT DAERAH	108	-	-	-	-	-	108
45	SEKRETARIAT DPRD	29	-	-	-	-	-	29
	JUMLAH	5.349	23	41	-	2	-	5.415

Dari Tabel 2.5 terlihat jumlah PNS dengan agama mayoritas adalah Islam sebanyak 98% (5349 PNS) dari seluruh PNS sisanya dibagi oleh Protestan (41 PNS), Katholik (23 PNS), Budha (2 PNS) dan Hindu (0 PNS).

TABEL 2.6 PNS BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI

Eselon	Tersedia	Terisi	Kosong
2.a	1	0	1
2.b	32	26	6
3.a	57	45	12
3.b	104	86	18
4.a	190	152	38
4.b	76	61	15
TOTAL	460	370	90

Dari Tabel 2.6 terlihat jumlah jabatan yang paling banyak kekosongan adalah Eselon IV/a (35 jabatan), hanya terisi 155 dari 190 jabatan yang tersedia

TABEL 2.7 PNS FUNGSIONAL PENDIDIKAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Guru	4	3	7
2	Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama	-	1	1
3	Guru Kelas Ahli Pertama	15	27	42
4	Guru Madya	349	487	836
5	Guru Muda	285	567	852
6	Guru Pendidikan Agama Islam Ahli Pertama	10	15	25
7	Guru Penjasorkes Ahli Pertama	3	-	3
8	Guru Pertama	196	302	498
9	Pamong Belajar Ahli Pertama	-	1	1
10	Pamong Belajar Madya	2	-	2
11	Pamong Belajar Pertama	-	1	1
12	Pamong Budaya Ahli Muda - Subkoordinator Sejarah, Tradisi Dan Tenaga Kebudayaan	-	1	1
13	Pamong Budaya Ahli Pertama	1	-	1
14	Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pai) Smp Madya	-	1	1
15	Pengawas Sekolah Ahli Muda - Subkoordinator Kurikulum Dan Penilaian Smp	1	-	1
16	Pengawas Sekolah Ahli Muda - Subkoordinator Kurikulum, Penilaian, Pengembangan Peserta Didik Dan Pem	1	-	1

17	Pengawas Sekolah Madya	33	12	45
18	Pengawas Sekolah Madya - Tk/Sd	1	1	2
19	Pengawas Sekolah Muda	1	5	6
20	Penilik Madya	6	-	6
21	Penilik Muda	2	-	2
22	Penilik Pertama	-	1	1
	Jumlah	910	1.425	2.335

Dari Tabel 2.7 diatas jumlah fungsional Pendidikan terbanyak disi oleh jabatan Guru (2364 PNS) dari 2441 PNS fungsional pendidikan, sisanya disi Pengawas(59 PNS), Penilik (11 PNS) dan Pamong belajar (7 PNS).

TABEL 2.8 PNS MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	-	1	1
2	Apoteker Ahli Madya / Madya	1	2	3
3	Apoteker Ahli Muda / Muda	-	1	1
4	Apoteker Ahli Pertama / Pertama Blud	-	4	4
5	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan	-	8	8
6	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan Non Blud	1	2	3
7	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	-	1	1
8	Asisten Apoteker Penyelia	1	10	11
9	Asisten Apoteker Terampil / Pelaksana	-	5	5
10	Bidan Ahli Madya / Madya	-	17	17
11	Bidan Ahli Muda / Muda	-	21	21
12	Bidan Ahli Pertama / Pertama	-	36	36
13	Bidan Mahir / Lanjutan	-	96	96
14	Bidan Pelaksana Lanjutan	-	68	68
15	Bidan Penyelia	-	72	72
16	Bidan Terampil / Pelaksana	-	104	104
17	Dokter Ahli Madya / Madya	20	25	45
18	Dokter Ahli Muda / Muda	2	5	7
19	Dokter Ahli Pertama	1	1	2
20	Dokter Ahli Pertama / Pertama	7	7	14
21	Dokter Gigi Ahli Madya / Madya	1	4	5
22	Dokter Gigi Ahli Pertama / Pertama	-	7	7

23	Dokter Spesialis Bedah Ahli Pertama	1	-	1
24	Dokter Spesialis Mata Ahli Pertama	-	1	1
25	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	-	2	2
26	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda / Muda	3	-	3
27	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	1	2	3
28	Fisioterapis Ahli Pertama / Pertama	-	1	1
29	Fisioterapis Mahir / Lanjutan	1	-	1
30	Fisioterapis Penyelia	1	-	1
31	Nutrisisionis Ahli Muda / Muda	-	5	5
32	Nutrisisionis Ahli Pertama / Pertama	1	1	2
33	Nutrisisionis Ahli Pertama / Pertama Blud	-	1	1
34	Nutrisisionis Mahir / Lanjutan	-	1	1
35	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	-	2	2
36	Nutrisisionis Penyelia	-	13	13
37	Okupasi Terapis Terampil / Pelaksana	-	1	1
38	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama / Kerja Pertama	-	1	1
39	Penata Anestesi Ahli Madya	1	1	2
40	Penata Anestesi Ahli Muda	2	-	2
41	Penata Anestesi Ahli Pertama	1	3	4
42	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya / Masyarakat Madya	1	-	1
43	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya Non Blud	1	-	1
44	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda	3	-	3
45	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama - Non Blud	-	1	1
46	Perawat Ahli Madya	8	19	27
47	Perawat Ahli Muda	11	18	29
48	Perawat Ahli Pertama	16	7	23
49	Perawat Gigi Ahli Pertama	-	1	1
50	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	1	4	5
51	Perawat Gigi Penyelia	1	13	14
52	Perawat Gigi Terampil	1	6	7
53	Perawat Madya	4	9	13
54	Perawat Mahir	1	5	6
55	Perawat Muda	4	10	14
56	Perawat Pelaksana	2	-	2
57	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	18	25

58	Perawat Penyelia	63	143	206
59	Perawat Pertama	1	1	2
60	Perekam Medis Pelaksana	5	6	11
61	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1	2	3
62	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan Non Blut	1	-	1
63	Perekam Medis Penyelia	1	3	4
64	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya / Kesehatan Madya	1	-	1
65	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda / Kesehatan Muda	-	2	2
66	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	-	3	3
67	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1	5	6
68	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia Non Blut	-	1	1
69	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana	6	8	14
70	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana Non Blut	3	1	4
71	Radiografer Pelaksana	-	2	2
72	Radiografer Penyelia	3	3	6
73	Refraksionis Optisien Penyelia	-	1	1
74	Refraksionis Optisien Terampil / Pelaksana	-	2	2
75	Sanitarian Ahli Madya / Madya	-	2	2
76	Sanitarian Ahli Pertama / Pertama	1	-	1
77	Sanitarian Mahir / Lanjutan	-	2	2
78	Sanitarian Penyelia	2	3	5
79	Teknik Elektromedis Terampil	1	-	1
80	Teknisi Elektromedis Ahli Muda / Muda	-	1	1
81	Teknisi Elektromedis Pelaksana	3	-	3
82	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	-	1	1
83	Teknisi Gigi Terampil / Pelaksana	2	-	2
84	Teknisi Transfusi Darah Terampil / Pelaksana	1	1	2
85	Terapis Wicara Terampil	1	-	1
	Jumlah	204	836	1.051

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat jumlah fungsional Kesehatan terbanyak diisi oleh jabatan Bidan (417 PNS) dari 1051 PNS fungsional Kesehatan dan jabatan Perawat (380 PNS), sedangkan Dokter (71 PNS) dan Dokter Gigi (12 PNS).

TABEL 2.9 PNS FUNGSIONAL LAINNYA

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda - Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Man	1	-	1
2	Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda - Subkoordinator Data, Informasi Dan Kerjasam	-	1	1
3	Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda - Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	-	1
4	Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda - Subkoordinator Promosi Pariwisata	1	-	1
5	Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Muda (Pb)	-	1	1
6	Analisis Akuakultur Ahli Muda	-	1	1
7	Analisis Hukum Ahli Muda - Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi	-	1	1
8	Analisis Hukum Muda (Pb)	-	1	1
9	Analisis Kebencanaan Muda (Pb)	2	-	2
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	5	7
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	1	-	1
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Aspirasi Dan Dokumentasi	1	-	1
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Evaluasi Dan Pelaporan	1	-	1
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Fasilitas Penganggaran	1	-	1
15	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Fasilitas Pengawasan	1	-	1
16	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	-	1	1
17	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat	1	-	1
18	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	-	1	1
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	-	1	1

20	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	1	-	1
21	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Pembinaan Bumd Dan Blud	1	-	1
22	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Pengendalian Program	1	-	1
23	Analisis Kebijakan Ahli Muda - Subkoordinator Penyusun Program	1	-	1
24	Analisis Kebijakan Muda (Pb)	6	3	9
25	Analisis Kepegawaian Ahli Muda - Subkoordinator Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paud Dan Pe	-	1	1
26	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1	1	2
27	Analisis Kepegawaian Muda	-	1	1
28	Analisis Kepegawaian Muda - Subkoordinator Formasi Dan Pengembangan	1	-	1
29	Analisis Kepegawaian Muda - Subkoordinator Jabatan	-	1	1
30	Analisis Kepegawaian Muda - Subkoordinator Kenaikan Pangkat	-	1	1
31	Analisis Kepegawaian Muda - Subkoordinator Kesejahteraan Pegawai	-	1	1
32	Analisis Kepegawaian Muda - Subkoordinator Pembinaan	-	1	1
33	Analisis Kepegawaian Muda - Subkoordinator Pendidikan Dan Pelatihan	1	-	1
34	Analisis Kepegawaian Muda - Subkoordinator Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian	-	1	1
35	Analisis Kepegawaian Pelaksana / Terampil	-	3	3
36	Analisis Kepegawaian Pelaksana / Terampil (Blud)	1	-	1
37	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda - Subkoordinator Distribusi Dan Cadangan Pangan	-	1	1
38	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda - Subkoordinator Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	-	1	1
39	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda - Subkoordinator Konsumsi, Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan	1	-	1

40	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	-	3	3
41	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama	2	3	5
42	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Muda (Pb)	2	4	6
43	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	-	1	1
44	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda - Subkoordinator Pasca Panen Dan Agribisnis Holtikultura	-	1	1
45	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda - Subkoordinator Pasca Panen Dan Agribisnis Perkebunan	1	-	1
46	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda - Subkoordinator Pasca Panen Dan Agribisnis Tanaman Pangan	-	1	1
47	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana	-	1	1
48	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	1	-	1
49	Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda - Subkoordinator Penelitian	-	1	1
50	Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda - Subkoordinator Pengembangan	-	1	1
51	Analisis Perdagangan Ahli Muda - Subkoordinator Pengelolaan Pasar	1	-	1
52	Analisis Perdagangan Ahli Muda - Subkoordinator Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	-	1	1
53	Analisis Perdagangan Ahli Muda - Subkoordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	-	1	1
54	Analisis Perdagangan Muda (Pb)	2	-	2
55	Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda	2	-	2
56	Arsiparis Ahli Muda - Subkoordinator Akuisisi Dan Pengelolaan Arsip	-	1	1
57	Arsiparis Ahli Muda - Subkoordinator Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	1	-	1
58	Arsiparis Ahli Pertama	-	2	2
59	Arsiparis Mahir	-	1	1
60	Arsiparis Muda (Pb)	-	1	1
61	Arsiparis Pelaksana	-	2	2
62	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	-	1
63	Arsiparis Penyelia	2	-	2

64	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	5	-	5
65	Assesor Sdm Aparatur Ahli Pertama	-	1	1
66	Auditor Ahli Pertama	-	3	3
67	Auditor Madya	2	1	3
68	Auditor Muda	3	7	10
69	Instruktur Ahli Pertama	2	-	2
70	Instruktur Muda	-	1	1
71	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda - Subkoordinator Hubungan Industrial	1	-	1
72	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda - Subkoordinator Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	1	1
73	Mediator Hubungan Industrial Pertama	1	-	1
74	Medik Veteriner Muda (Pb)	-	1	1
75	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator Siak) Terampil	9	6	15
76	Pekerja Sosial Ahli Muda	1	-	1
77	Pekerja Sosial Ahli Muda - Subkoordinator Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	-	1	1
78	Pekerja Sosial Ahli Muda - Subkoordinator Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1	-	1
79	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1	-	1
80	Pelatih Olahraga Ahli Muda - Subkoordinator Pembinaan Olahraga	-	1	1
81	Pemadam Kebakaran Terampil	3	-	3
82	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	1	2
83	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda - Subkoordinator Kesehatan Reproduksi, Pengenda	-	1	1
84	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda - Subkoordinator Pembinaan Dan Pelayanan Keluar	1	-	1
85	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda - Subkoordinator Penggerakan Institusi Dan Pera	1	-	1
86	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda - Subkoordinator Penyuluh Dan Penggerakan	-	1	1
87	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Muda (Pb)	-	1	1

88	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda - Subkoordinator Kedaruratan Dan Logistik	-	1	1
89	Penata Penanggulangan Bencana Muda (Pb)	1	1	2
90	Penata Perizinan Ahli Muda	1	2	3
91	Penata Ruang Ahli Muda - Subkoordinator Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Penataan Ruang	1	-	1
92	Penata Ruang Ahli Pertama	1	1	2
93	Penata Ruang Muda (Pb)	-	1	1
94	Penera Ahli Pertama	-	2	2
95	Penera Pelaksana	1	1	2
96	Pengantar Kerja Ahli Muda - Subkoordinator Pelatihan Kerja Dan Produktifitas	-	1	1
97	Pengantar Kerja Pertama	-	2	2
98	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda - Subkoordinator Perbibitan Dan Produksi Peternakan	1	-	1
99	Pengawas Bibit Ternak Muda	1	-	1
100	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	1	1	2
101	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	1	-	1
102	Pengawas Bibit Ternak Pertama	-	1	1
103	Pengawas Kemetrolagian Muda (Pb)	1	-	1
104	Pengawas Kemetrolagian Pertama	1	-	1
105	Pengawas Koperasi Ahli Muda - Subkoordinator Kelembagaan, Perijinan, Keanggotaan Dan Penerapan Perat	1	-	1
106	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda - Subkoordinator Penataan Lingkungan Hidup	1	-	1
107	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda - Subkoordinator Produksi Perkebunan	1	-	1
108	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda - Subkoordinator Sarana Prasarana Dan Usaha Peternakan	1	-	1
109	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda (Pb)	-	1	1
110	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	-	1
111	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	2	1	3
112	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintah) Madya	6	-	6
113	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas	1	8	9

	Pemerintah) Muda			
114	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintah) Pertama	-	1	1
115	Pengawas Perikanan Pelaksana	1	-	1
116	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda - Subkoordinator Kesehatan, Lingkungan Dan Kawasan Budidaya	-	1	1
117	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	-	1	1
118	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	3	-	3
119	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	7	-	7
120	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda - Subkoordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil	-	1	1
121	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda - Subkoordinator Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	1	-	1
122	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda (Pb)	-	1	1
123	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda - Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan	-	1	1
124	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda - Subkoordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup	-	1	1
125	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda - Subkoordinator Pengelolaan Sampah	1	-	1
126	Pengendali Dampak Lingkungan Muda (Pb)	-	1	1
127	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	-	1	1
128	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Pelaksana/Terampil	-	1	1
129	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda - Subkoordinator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	1	1
130	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda - Subkoordinator Pemberdayaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi	1	-	1
131	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda - Subkoordinator Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa	1	-	1

132	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda - Subkoordinator Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1	-	1
133	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Pb)	2	2	4
134	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	2	-	2
135	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	1	-	1
136	Penyuluh Perindustrian Muda (Pb)	2	-	2
137	Penyuluh Pertanian Madya	10	1	11
138	Penyuluh Pertanian Muda	7	4	11
139	Penyuluh Pertanian Muda (Pb)	-	2	2
140	Penyuluh Pertanian Pelaksana	-	2	2
141	Penyuluh Pertanian Pertama	3	9	12
142	Penyuluh Sosial Ahli Muda - Subkoordinator Kelembagaan, Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial	-	1	1
143	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	2	-	2
144	Penyuluh Sosial Muda (Pb)	1	-	1
145	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda - Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan	-	1	1
146	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	1	-	1
147	Perencana Ahli Muda - Subkoordinator Infrastruktur	-	1	1
148	Perencana Ahli Muda - Subkoordinator Pemerintahan	-	1	1
149	Perencana Ahli Muda - Subkoordinator Pengembangan Wilayah	1	-	1
150	Perencana Ahli Muda - Subkoordinator Perencanaan Dan Pendanaan	1	-	1
151	Perencana Ahli Muda - Subkoordinator Program	4	-	4
152	Perencana Ahli Muda - Subkoordinator Program Dan Keuangan	3	1	4
153	Perencana Muda	-	1	1
154	Perencana Muda (Pb)	7	5	12
155	Perencana Pertama	2	2	4
156	Perisalah Legislatif Muda (Pb)	1	-	1
157	Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana	3	-	3

158	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda - Subkoordinator Komunikasi Pimpinan	1	-	1
159	Pranata Hubungan Masyarakat Muda (Pb)	1	1	2
160	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	-	1	1
161	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	-	2	2
162	Pranata Humas Ahli Muda - Subkoordinator Kehumasan Dan Kemitraan Komunitas	1	-	1
163	Pranata Humas Ahli Muda - Subkoordinator Pengelolaan Layanan Informasi Publik	1	-	1
164	Pranata Humas Ahli Muda - Subkoordinator Pengelolaan Opini Dan Layanan Hubungan Media	-	1	1
165	Pranata Komputer Ahli Muda - Sub Koordinator Informasi Kepegawaian	1	-	1
166	Pranata Komputer Ahli Muda - Subkoordinator Infrastruktur Dan Teknologi	1	-	1
167	Pranata Komputer Ahli Muda - Subkoordinator Sistem Informasi Dan Pengolahan Data	-	1	1
168	Pranata Komputer Ahli Pertama Blud	-	1	1
169	Pranata Komputer Pelaksana	1	1	2
170	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	4	5	9
171	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Blud	-	1	1
172	Pranata Komputer Pertama	4	3	7
173	Pustakawan Ahli Muda - Subkoordinator Layanan, Informasi, Otomasi Dan Kerjasama	-	1	1
174	Pustakawan Ahli Muda - Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan Dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca	-	1	1
175	Pustakawan Pelaksana	1	1	2
176	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1	1	2
177	Sandiman Ahli Muda - Subkoordinator Keamanan Informasi Dan Persandian	1	-	1
178	Statistisi Ahli Muda - Subkoordinator Statistik Sosial, Pemerintahan Dan Budaya	1	-	1
179	Statistisi Muda (Pb)	-	1	1
180	Statistisi Pelaksana	-	1	1
181	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda - Subkoordinator Pemeliharaan Dan Pengawasan	-	1	1
182	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	3	-	3
183	Teknik Jalan Dan Jembatan Muda (Pb)	1	-	1

184	Teknik Jalan Dan Jembatan Pelaksana	3	2	5
185	Teknik Pengairan Ahli Muda - Subkoordinator Jaringan Irigasi Dan Drainase	1	-	1
186	Teknik Pengairan Ahli Muda - Subkoordinator Sumber Daya Air Dan Irigasi	1	-	1
187	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	-	1
188	Teknik Pengairan Pelaksana	2	-	2
189	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda - Subkoordinator Penyehatan Lingkungan Dan Pengembangan Kawas	1	-	1
190	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana	1	1	2
191	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda - Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi	1	-	1
192	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda - Subkoordinator Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas P	-	1	1
193	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda - Subkoordinator Pembinaan Dan Pengendalian Perumahan	-	1	1
194	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda - Subkoordinator Penataan Infrastruktur Dan Sarana Pras	1	-	1
195	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda - Subkoordinator Pertamanan Dan Tempat Pemakaman Umum	1	-	1
196	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Muda	1	-	1
197	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Muda (Pb)	-	2	2
198	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Pelaksana	1	1	2
199	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Pertama	1	2	3
	Jumlah	208	183	391

Dari Tabel 2.9 diatas jumlah fungsional Lainnya terbanyak dari jabatan Penyuluh Pertanian (39 PNS) dari 391 PNS fungsional Lainnya, diikuti Pranata Komputer (24 PNS), Perencana (29 PNS) dan Analis Kebijakan Ahli Muda (31 PNS).

TABEL 2.10 PNS FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)

No	Laki-	Perempuan	Jumlah
----	-------	-----------	--------

	Jabatan	laki		
1	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	1	-	1
2	AHLI PERTAMA GURU BIMBINGAN KONSELING	1	1	2
3	AJUDAN	-	1	1
4	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	1	-	1
5	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	-	1	1
6	ANALIS BENCANA	1	1	2
7	ANALIS BIMTEK DAN BANTEK	1	-	1
8	ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3	1	4
9	ANALIS HUMAS	1	2	3
10	ANALIS IDEOLOGI	1	-	1
11	ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA	1	-	1
12	ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	1	-	1
13	ANALIS JABATAN	-	1	1
14	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	-	1	1
15	ANALIS KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA	1	-	1
16	ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	-	1	1
17	ANALIS KELUARGA BERENCANA	1	-	1
18	ANALIS KEMASYARAKATAN	-	1	1
19	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA/TERAMPIL	1	-	1
20	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	-	5
21	ANALIS KESEHATAN	2	1	3
22	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	1	-	1
23	ANALIS KEUANGAN	-	2	2
24	ANALIS LAHAN PERTANIAN	1	-	1
25	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	1	-	1
26	ANALIS LAYANAN UMUM	6	9	15
27	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	-	1	1
28	ANALIS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	1	2
29	ANALIS PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	2	1	3
30	ANALIS PARIWISATA	-	1	1
31	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1	1
32	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	-	1	1
33	ANALIS PENDIDIKAN	2	-	2
34	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	2	-	2
35	ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	-	1	1
36	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2	-	2
37	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI MEDIS (BLUD)	1	-	1
38	ANALIS PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN	1	1	2
39	ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	1	-	1
40	ANALIS PERBENDAHARAAN	1	-	1
41	ANALIS PEREKONOMIAN	1	1	2
42	ANALIS PERTANAHAN	-	1	1
43	ANALIS PESERTA DIDIK	3	1	4
44	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	-	1	1
45	ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN	2	-	2
46	ANALIS PRODUK HUKUM	1	3	4
47	ANALIS PROTOKOL	1	2	3
48	ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	-	1	1
49	ANALIS TAMAN	1	-	1
50	Analisis Toponimi dan Data Wilayah	-	1	1
51	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	1	3

52	BENDAHARA	6	6	12
53	BIDAN TERAMPIL	-	7	7
54	BINATU RUMAH SAKIT	3	-	3
55	DOKTER GIGI - AHLI PERTAMA	-	1	1
56	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	1	-	1
57	GURU	8	5	13
58	GURU KELAS AHLI PERTAMA	16	49	65
59	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	-	1	1
60	GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	44	55	99
61	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	1	1	2
62	JURU PUNGUT RETRIBUSI	47	2	49
63	OPERATOR ALAT BERAT	1	-	1
64	OPERATOR MESIN	1	-	1
65	OPERATOR RADIO	1	1	2
66	OPERATOR TERMINAL	15	-	15
67	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	1	-	1
68	PEMELIHARA JALAN	14	-	14
69	PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	1	-	1
70	PENELAHAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA	1	-	1
71	PENELAHAH PERKEMBANGAN BUMD	1	-	1
72	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	-	1
73	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	-	1	1
74	PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2	1	3
75	PENGADMINISTRASI PERIJINAN	1	-	1
76	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	1	2	3
77	PENGADMINISTRASI UMUM	288	93	381
78	PENGADMINISTRASI UMUM BLUD	8	12	20
79	PENGADMINISTRASIAN UMUM	6	1	7
80	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	1	-	1
81	PENGAWAS KOPERASI	1	-	1
82	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	1	-	1
83	PENGAWAS SATUAN PELAYANAN	1	-	1
84	PENGELOLA ADAT DAN KESENIAN	2	-	2
85	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	4	1	5
86	PENGELOLA BARANG	1	-	1
87	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	5	4	9
88	PENGELOLA BENGKEL	2	-	2
89	PENGELOLA DATA	9	6	15
90	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	2	-	2
91	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	3	-	3
92	PENGELOLA DATA PELAYANAN	1	1	2
93	PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	1	-	1
94	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	4	5	9
95	PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	-	1	1
96	PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	-	1	1
97	PENGELOLA GAJI	-	1	1
98	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	1	2
99	PENGELOLA KEPERAWATAN	1	-	1
100	PENGELOLA KEUANGAN	56	50	106
101	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	-	1	1
102	PENGELOLA LABORATORIUM	1	2	3
103	PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN	-	3	3

104	PENGELOLA PASAR	1	-	1
105	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	1	-	1
106	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	1	4	5
107	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	-	1	1
108	PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	2	-	2
109	PENGELOLA PENDAPATAN	2	-	2
110	PENGELOLA PENERANGAN JALAN	1	-	1
111	PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA AHLI PERTAMA	-	2	2
112	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	1	2	3
113	PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	-	1	1
114	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	2	8	10
115	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	3	2	5
116	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	-	1	1
117	PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	1	-	1
118	PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	-	1	1
119	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	1	-	1
120	PENGEMUDI	11	-	11
121	PENGEMUDI AMBULANCE	4	-	4
122	PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH	1	-	1
123	PENGOLAH DATA PELAYANAN	-	1	1
124	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	1	-	1
125	PENJAGA PINTU AIR	7	-	7
126	PENYULUH KEPEMUDAAN	1	-	1
127	PENYULUH KOPERASI	-	1	1
128	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	-	1	1
129	PENYULUH WISATA	1	-	1
130	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	6	13
131	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN (BLUD)	1	-	1
132	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	2	-	2
133	PENYUSUN RENCANA MUTASI	1	-	1
134	PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	1	-	1
135	PETUGAS KEAMANAN	6	-	6
136	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	13	-	13
137	PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT	-	1	1
138	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA / TERAMPIL	2	1	3
139	PRAMU BAKTI	110	6	116
140	PRAMU KEBERSIHAN	43	2	45
141	PRAMU TAMAN DAN PEMELIHARAAN	-	1	1
142	PRANATA KEARSIPAN	-	1	1
143	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	-	1
144	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	1	-	1
145	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	1	-	1
146	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	-	1
147	PRANATA TATA PRAJA	2	1	3
148	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	2	-	2
149	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6	-	6

150	TENAGA GURU	1	10	11
151	VERIFIKATOR KEUANGAN	1	1	2
	Jumlah	865	413	1.278

Dari Tabel 2.10 diatas jumlah fungsional Umum (Pelaksana) terbanyak dari jabatan Pengadministrasi Umum (381 PNS) dari 1.278 PNS fungsional umum, diikuti Pramu Bakti (116 PNS), Pengelola Keuangan (106 PNS) dan Guru Pendidikan Agama Islam Ahli Pertama (99 PNS). Sedangkan untuk jabatan fungsional umum lainnya kurang dari 100 PNS tiap jabatannya.

TABEL 2.11 PNS BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	-	-	1	5	1	7	3	3	7	3	1	-	-	-	31
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	7	1	1	1	-	-	19
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	1	1	1	2	4	11	19	9	9	10	1	1	-	-	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	7	7	4	1	-	-	-	27
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	-	-	-	1	7	3	10	5	7	3	2	7	7	-	1	-	-	53
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	18	3	3	7	-	5	2	1	-	-	-	39
7	DINAS KESEHATAN	-	-	-	1	1	8	48	94	145	167	114	151	29	14	20	-	-	792
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	-	6	2	1	1	-	-	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	1	9	2	2	-	-	-	27
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	17	1	3	5	8	1	2	1	7	4	-	1	-	-	50
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	-	-	-	1	-	-	2	2	7	17	10	17	6	7	4	-	-	73
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	2	-	-	4	5	5	2	1	7	3	-	1	-	-	30
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	18	5	14	25	16	19	12	5	9	3	-	1	-	-	127
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	6	2	1	1	-	-	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	2	5	6	-	1	-	-	25
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	5	2	4	-	1	-	-	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	4	4	11	29	71	84	480	410	526	323	685	213	11	-	-	2.851
18	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	3	-	1	9	7	13	4	-	4	4	-	-	-	-	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	-	-	1	10	3	9	8	13	14	5	2	7	3	1	1	-	-	77
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	1	2	-	11	6	4	6	1	1	1	-	-	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	1	1	7	5	6	3	1	11	1	1	1	-	-	38
22	DINAS SOSIAL	-	-	-	1	-	-	3	3	3	1	2	4	1	1	-	-	-	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	1	-	-	1	-	7	2	6	14	7	6	2	-	-	46

24	KECAMATAN BANDAR	-	-	-	-	-	1	3	2	5	2	2	1	2	-	-	-	-	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	2	2	-	-	-	-	12
26	KECAMATAN BATANG	-	-	-	-	1	3	1	8	7	25	11	10	3	-	-	-	-	69
27	KECAMATAN BAWANG	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	2	1	-	-	-	-	13
28	KECAMATAN BLADO	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	3	2	-	1	-	-	-	12
29	KECAMATAN GRINGSING	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	4	1	-	-	-	-	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	1	-	1	-	-	-	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1	2	1	1	-	-	-	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	9
33	KECAMATAN REBAN	-	-	-	-	-	-	4	4	1	2	2	1	2	-	-	-	-	16
34	KECAMATAN SUBAH	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	1	-	1	-	-	-	11
35	KECAMATAN TERSONO	-	-	-	-	1	-	-	4	-	2	1	4	1	-	-	-	-	13
36	KECAMATAN TULIS	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	-	4	2	-	-	-	-	15
37	KECAMATAN WARUNGASEM	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	-	1	1	-	-	-	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	1	2	-	1	-	-	-	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	1	-	-	2	2	3	3	4	3	2	1	1	-	-	22
40	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	-	-	1	1	-	4	23	12	23	66	65	77	38	23	3	-	-	336
42	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	-	-	-	-	-	-	32	2	13	22	12	13	1	1	-	-	-	96
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	2	2	2	8	12	4	3	5	2	4	1	1	-	-	46
44	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	1	-	2	7	7	27	21	8	15	6	7	6	1	-	108
45	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	1	-	1	2	3	6	3	5	3	3	1	1	-	-	29
	Jumlah	-	-	6	68	36	89	320	334	868	860	835	781	861	294	62	1	-	5.415

TABEL 2.12 JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	< 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	> 61	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	7	6	13	5	-	31
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	3	1	6	9	-	19
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	3	15	31	20	-	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	4	5	14	4	-	27
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	-	11	12	17	13	-	53
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	9	12	7	11	-	39
7	DINAS KESEHATAN	-	27	290	305	170	-	792
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	-	5	5	4	5	-	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	4	3	9	11	-	27
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	3	24	23	-	50
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	-	5	20	25	23	-	73
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	5	3	10	12	-	30
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	10	14	40	63	-	127
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	2	1	10	7	-	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	2	3	10	10	-	25
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	3	8	9	-	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	125	632	757	1.337	-	2.851
18	DINAS PERHUBUNGAN	-	9	4	17	15	-	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	-	5	3	25	44	-	77
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	2	6	14	11	-	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	6	6	17	9	-	38
22	DINAS SOSIAL	-	2	4	6	7	-	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	-	3	9	16	18	-	46
24	KECAMATAN BANDAR	-	-	3	3	12	-	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	-	-	1	5	6	-	12
26	KECAMATAN BATANG	-	2	9	31	27	-	69
27	KECAMATAN BAWANG	-	-	-	4	9	-	13

28	KECAMATAN BLADO	-	-	-	4	8	-	12
29	KECAMATAN GRINGSING	-	-	2	4	6	-	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	-	-	1	2	8	-	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	-	-	-	5	6	-	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	-	-	-	3	6	-	9
33	KECAMATAN REBAN	-	-	-	6	10	-	16
34	KECAMATAN SUBAH	-	-	2	2	7	-	11
35	KECAMATAN TERSONO	-	-	-	4	9	-	13
36	KECAMATAN TULIS	-	-	-	1	14	-	15
37	KECAMATAN WARUNGASEM	-	-	4	1	7	-	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	-	-	3	4	6	-	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	3	2	9	8	-	22
40	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG	-	-	1	-	-	-	1
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	-	17	82	186	51	-	336
42	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	-	30	31	29	6	-	96
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	4	9	14	19	-	46
44	SEKRETARIAT DAERAH	-	14	22	41	31	-	108
45	SEKRETARIAT DPRD	-	2	7	11	9	-	29
	Jumlah	-	321	1.239	1.754	2.101	-	5.415

TABEL 2.13 JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	3	-	-	6	1	16	5	-	31
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	2	-	-	1	-	11	4	1	19
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1	2	13	-	-	5	3	34	11	-	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	1	-	-	1	-	19	5	1	27
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	-	4	15	-	-	10	2	14	8	-	53
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	7	-	-	19	-	11	2	-	39
7	DINAS KESEHATAN	1	5	58	3	-	517	34	157	17	-	792
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	-	-	1	-	-	1	2	11	4	-	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	2	4	-	-	2	-	13	6	-	27
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12	12	10	-	-	2	-	12	2	-	50
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1	-	2	-	-	5	4	57	4	-	73
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	2	7	-	-	2	1	12	5	-	30
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	17	53	-	-	10	3	26	4	-	127
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	1	3	-	-	5	-	6	5	-	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	1	4	-	-	-	-	15	5	-	25
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	4	-	-	1	1	9	5	-	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	37	197	-	68	28	6	2.387	121	1	2.851
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	-	19	-	2	11	-	6	4	-	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6	16	31	-	-	4	-	17	3	-	77
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	9	-	1	8	1	11	3	-	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	2	9	-	-	5	-	18	4	-	38
22	DINAS SOSIAL	1	1	3	1	-	2	1	7	3	-	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	-	1	1	-	-	1	-	34	8	1	46
24	KECAMATAN BANDAR	-	1	13	-	-	1	-	2	1	-	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	-	-	4	-	1	-	1	5	1	-	12
26	KECAMATAN BATANG	-	2	24	-	-	5	3	33	2	-	69
27	KECAMATAN BAWANG	-	-	8	-	-	-	-	4	1	-	13
28	KECAMATAN BLADO	1	2	1	-	-	-	-	7	1	-	12
29	KECAMATAN GRINGSING	-	-	6	-	-	-	-	4	2	-	12

30	KECAMATAN KANDEMAN	-	-	4	-	-	1	1	4	1	-	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	-	1	2	-	-	1	-	5	2	-	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	-	-	3	-	-	-	-	4	2	-	9
33	KECAMATAN REBAN	-	-	9	-	-	-	1	4	2	-	16
34	KECAMATAN SUBAH	-	1	3	-	-	-	-	7	-	-	11
35	KECAMATAN TERSONO	-	-	7	-	-	1	-	4	1	-	13
36	KECAMATAN TULIS	-	-	3	-	-	-	-	10	2	-	15
37	KECAMATAN WARUNGASEM	-	-	4	-	-	-	-	6	2	-	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	-	1	3	-	-	1	1	7	-	-	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	-	6	-	-	2	1	9	3	-	22
40	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	2	4	35	1	-	164	6	106	18	-	336
42	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	-	-	3	-	-	58	4	22	9	-	96
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	1	18	-	1	5	-	15	4	-	46
44	SEKRETARIAT DAERAH	1	-	23	-	-	6	6	48	24	-	108
45	SEKRETARIAT DPRD	1	1	7	-	-	2	1	13	4	-	29
		54	117	642	5	73	893	84	3.223	320	4	5.415

TABEL 2.14 JUMLAH PNS BERDASARKAN AGAMA PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	30	-	1	-	-	-	31
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19	-	-	-	-	-	19
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	67	1	1	-	-	-	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	27	-	-	-	-	-	27
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	53	-	-	-	-	-	53
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38	-	1	-	-	-	39
7	DINAS KESEHATAN	782	2	7	-	1	-	792
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	19	-	-	-	-	-	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27	-	-	-	-	-	27
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	49	-	1	-	-	-	50
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	73	-	-	-	-	-	73
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30	-	-	-	-	-	30
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	127	-	-	-	-	-	127
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	-	-	-	-	-	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25	-	-	-	-	-	25
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	2	-	-	-	-	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.815	13	23	-	-	-	2.851
18	DINAS PERHUBUNGAN	43	1	1	-	-	-	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	77	-	-	-	-	-	77
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	33	-	-	-	-	-	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	37	-	1	-	-	-	38
22	DINAS SOSIAL	19	-	-	-	-	-	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	45	1	-	-	-	-	46
24	KECAMATAN BANDAR	18	-	-	-	-	-	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	12	-	-	-	-	-	12
26	KECAMATAN BATANG	69	-	-	-	-	-	69
27	KECAMATAN BAWANG	13	-	-	-	-	-	13
28	KECAMATAN BLADO	12	-	-	-	-	-	12
29	KECAMATAN GRINGSING	12	-	-	-	-	-	12

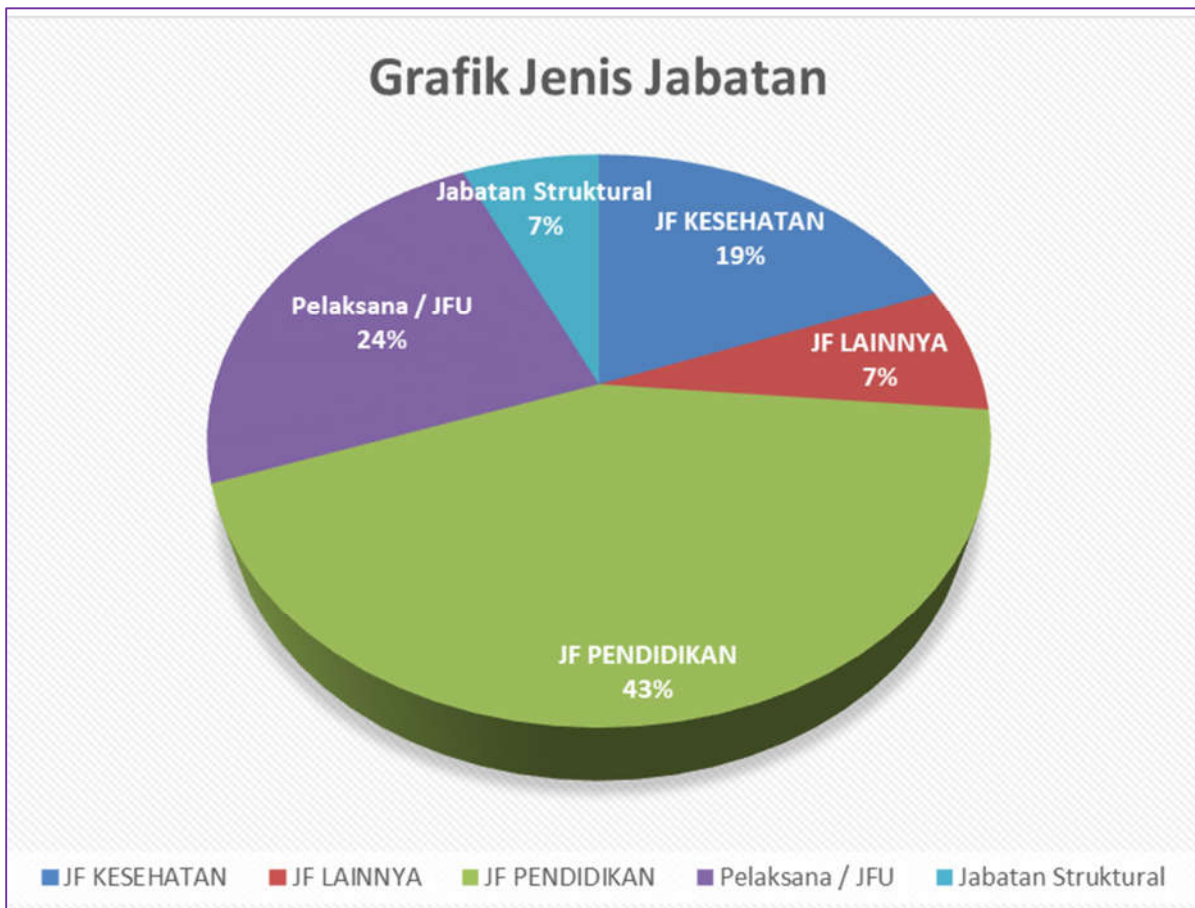
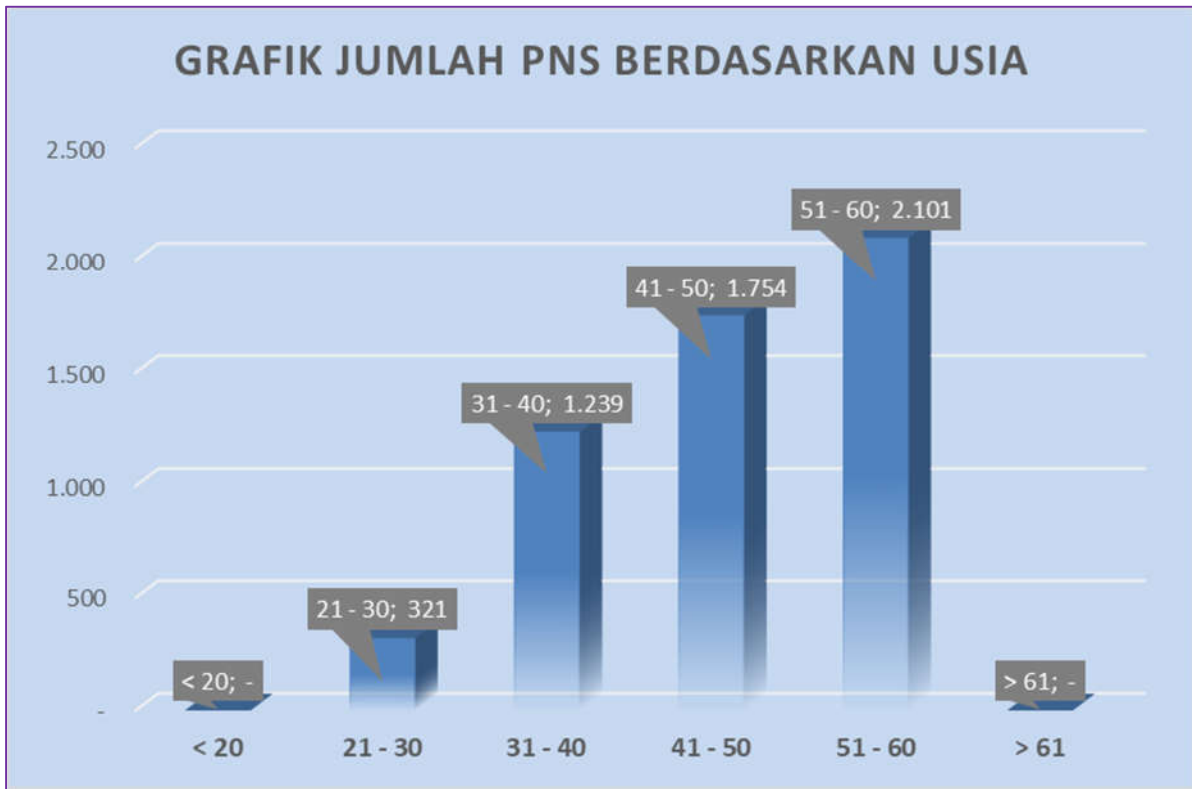
30	KECAMATAN KANDEMAN	11	-	-	-	-	-	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	11	-	-	-	-	-	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	8	-	1	-	-	-	9
33	KECAMATAN REBAN	16	-	-	-	-	-	16
34	KECAMATAN SUBAH	11	-	-	-	-	-	11
35	KECAMATAN TERSONO	13	-	-	-	-	-	13
36	KECAMATAN TULIS	15	-	-	-	-	-	15
37	KECAMATAN WARUNGASEM	12	-	-	-	-	-	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	13	-	-	-	-	-	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21	-	1	-	-	-	22
40	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG	1	-	-	-	-	-	1
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	331	2	2	-	1	-	336
42	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	95	-	1	-	-	-	96
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45	1	-	-	-	-	46
44	SEKRETARIAT DAERAH	108	-	-	-	-	-	108
45	SEKRETARIAT DPRD	29	-	-	-	-	-	29
	JUMLAH	5.349	23	41	-	2	-	5.415

TABEL 2.15 JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER-OPD

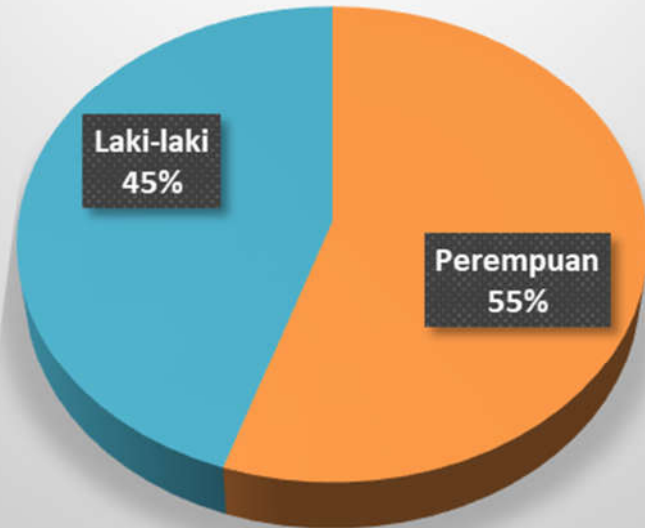
No	Unit Organisasi / OPD	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	17	14	31
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	11	19
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	32	37	69
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12	15	27
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	15	38	53
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15	24	39
7	DINAS KESEHATAN	631	161	792
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	11	8	19
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	17	27
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12	38	50
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	34	39	73
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12	18	30
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15	112	127
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	11	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12	13	25
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	11	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.639	1.212	2.851
18	DINAS PERHUBUNGAN	4	41	45
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	13	64	77
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	19	14	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13	25	38

22	DINAS SOSIAL	6	13	19
23	INSPEKTORAT DAERAH	25	21	46
24	KECAMATAN BANDAR	5	13	18
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	4	8	12
26	KECAMATAN BATANG	21	48	69
27	KECAMATAN BAWANG	4	9	13
28	KECAMATAN BLADO	5	7	12
29	KECAMATAN GRINGSING	4	8	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	1	10	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	4	7	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	-	9	9
33	KECAMATAN REBAN	1	15	16
34	KECAMATAN SUBAH	1	10	11
35	KECAMATAN TERSONO	3	10	13
36	KECAMATAN TULIS	3	12	15
37	KECAMATAN WARUNGASEM	4	8	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	5	8	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	13	22
40	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG	1	-	1
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	223	113	336
42	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	67	29	96
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5	41	46
44	SEKRETARIAT DAERAH	37	71	108
45	SEKRETARIAT DPRD	5	24	29
	Jumlah	2.985	2.430	5.415

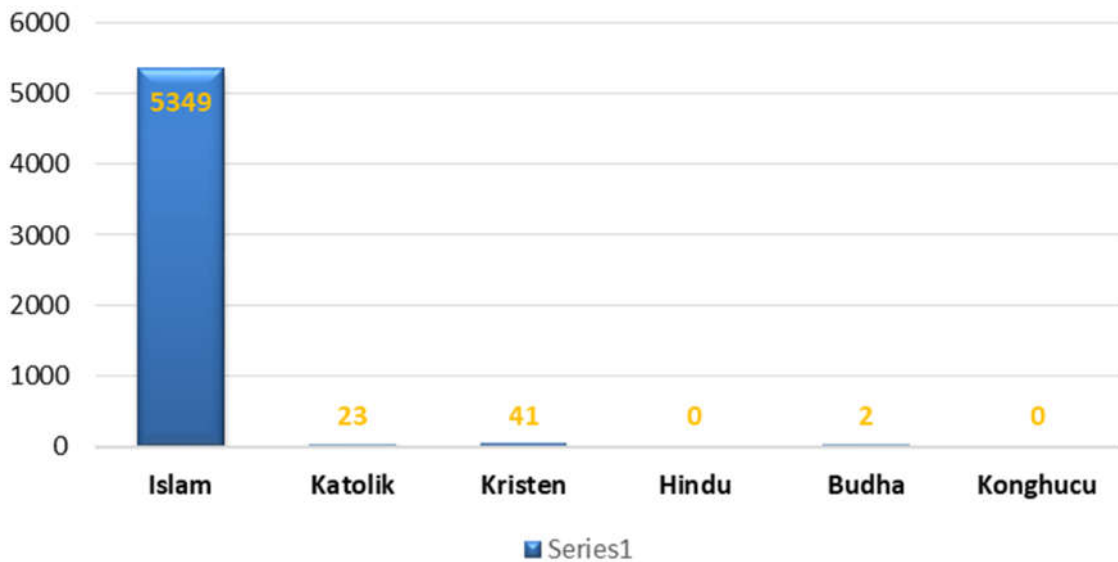
GAMBAR 2.1. JUMLAH PNS DALAM GRAFIK



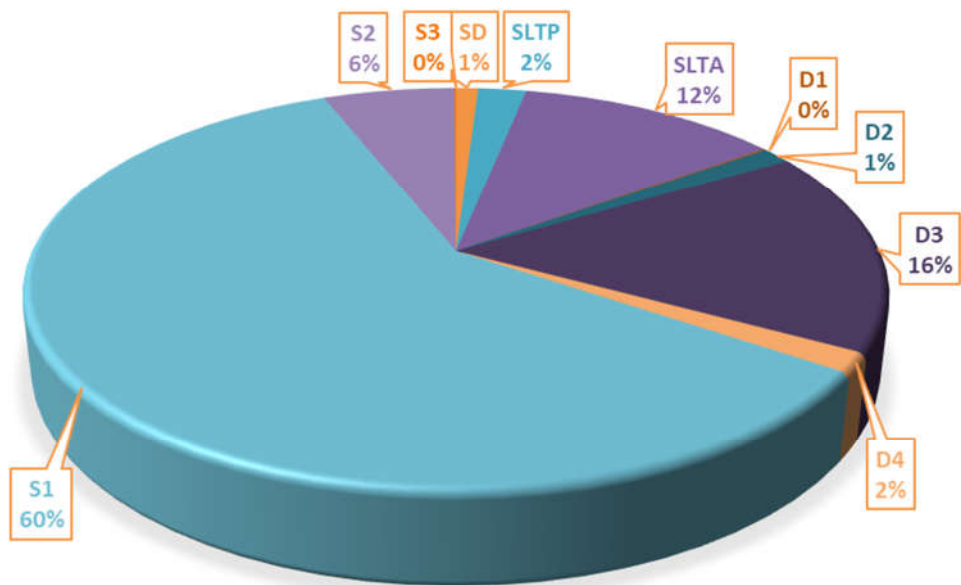
Grafik Jenis Kelamin



Grafik Agama



GRAFIK TINGKAT PENDIDIKAN



GRAFIK GOLONGAN

